

RENCANA STRATEGIS

REVISI

2020-2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 memuat pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan kedalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2019-2024.

Dalam rangka efektifitas manajemen program, Revisi Renstra Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 juga merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2019-2024. Revisi Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana operasional implementasi tugas dan fungsi lembaga secara optimal yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap tahun anggaran.

Bandar Lampung, Januari 2022

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. M. FIRSADA, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR BAGAN

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

I.1.	LATAR BELAKANG	I.1
I.2.	LANDASAN HUKUM	I.2
I.3.	MAKSUD DAN TUJUAN	I.7
I.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	I.7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

II.1.	TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II.1
II.2.	SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	II.9
II.3.	KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	II.12
II.4.	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	II.16

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

III.1.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	III.1
III.2.	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.	III.3
III.3.	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD KABUPATEN/ KOTA	III.7
III.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III.7
III.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III.9

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	IV.1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	V.1
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
	VI.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	VI.1
	VI.2 INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN	VI.11
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII	PENUTUP	

DAFTAR BAGAN

	<i>Halaman</i>
Bagan II.2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung (Perda) Provinsi Lampung Nomor : 56 Tahun 2019	II.1

\

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel II.1	Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan	II.9
Tabel II.2	Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	II.10
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	II.12
Tabel II.4	Kegiatan Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II.13
Tabel II.5	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2014-2018	II.13
Tabel II.6	Pembinaan Politik Masyarakat se-Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II.14
Tabel II.7	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014-2019	II.14
Tabel II.8	Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Tahun 2015-2019	II.15
Tabel II.9	Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II.15
Tabel II.10	Kegiatan Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	II.16
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III.2
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024	IV.1

Tabel IV.2	Tujuan dan Sasaran Pendukung Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024	IV.2
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.3
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	VI.2
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	VII.1
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.2

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) memuat dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan/sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunanyang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan terhadap dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 sebagai akibat terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah



ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, maka perangkat daerah perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PPD).

Substansi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung perlu mengalami perubahan meliputi kerangka pendanaan, target indikator tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya, IKU perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024, selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023 dan 2024, dengan demikian terwujud keselarasan antara perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024 dengan perencanaan strategis di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah provinsi dan tujuan serta sasaran perangkat daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar 1945;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah atas Perubahan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa;
19. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Kerukunan Umat Beragama;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;



27. Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kesadaran Bela Negara;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
29. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
32. Permendagri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
33. Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
34. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
35. Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Mendagri dan Pemda dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
37. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan



- Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 40. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.06/ Menko/ Polhukam/ 01/ 2012 Perihal Pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
 41. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/618/SJ tanggal 04 Februari 2015 Perihal Pelaksanaan Demokrasi di Daerah;
 42. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 43. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 44. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
 45. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
 47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491); dan



48. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah penyesuaian indikator dan target kinerja perangkat daerah, indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penjabaran visi dan misi yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Sedangkan tujuan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- b. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- c. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
- d. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik

I.4. SISTIMATIKA PENULISAN.

Perubahan Renstra Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan



Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Perubahan Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu- Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan



Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya, sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

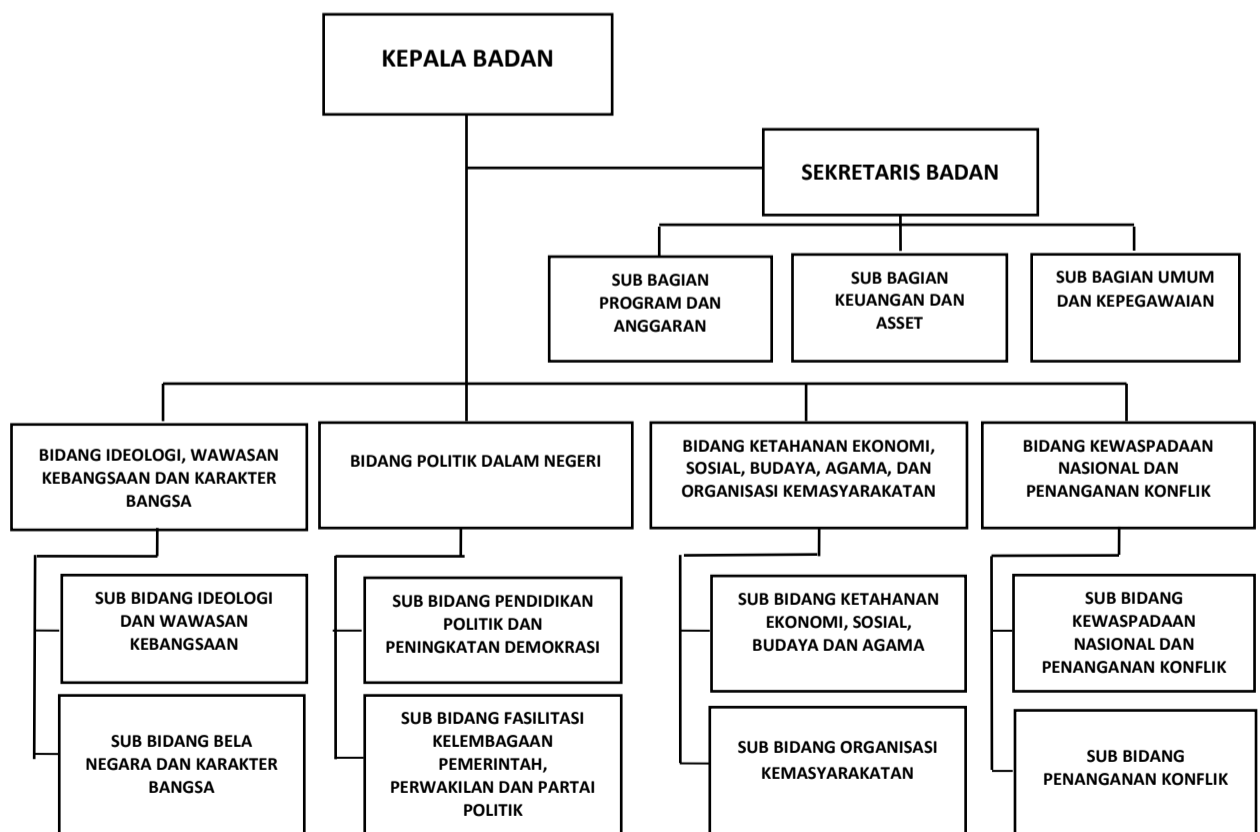
II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Bagan II.1

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

(Pergub Lampung Nomor : 56 Tahun 2019)





Dengan perubahan struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, tidak terdapat perubahan pada jumlah jabatan struktural, namun terjadi perubahan yang signifikan pada tugas fungsi dari lembaga tersebut terutama perubahan tugas dan fungsi dari 8 (delapan) sub bidang.

Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan, teknis kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- Pelaksana kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksana koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,



penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretaris, membawahi :

- 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;



- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:

- 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang



pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :



- 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
dan
- 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan
Partai Politik.

Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,



evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.

- Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

- 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan :

- Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar



negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

- 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
- 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.



II.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 17 jabatan struktural berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu :

- 1) 1 Kepala Badan, Pimpinan Pratama
- 2) 1 Sekretaris, Pejabat Administrator
- 3) 4 Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta
- 4) 11 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Pejabat Pengawas

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.1

**Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
Berdasarkan Pendidikan**

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	12	5	17
3.	Strata 1	14	6	20
4.	D4	-	-	-
5.	Sarmu/D3	1	-	1
6.	SLTA	11	2	13
7.	SLTP	1	-	1
8.	SD	-	-	-
	Jumlah	39	13	52

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 32,69 % berpendidikan S2 dan 38,48 % berpendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda kebawah. Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan.



Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Golongan IV : 13 Orang
2. Golongan III : 27 Orang
3. Golongan II : 12 Orang
4. Golongan I : 0 Orang

b. Perlengkapan

Untuk Mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan meliputi :

Tabel II.2
Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	SARANA DAN PRASARANA	JML	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Kendaraan Roda Empat				
a.	Jeep Daihatsu BE 880 AZ	1		Kurang baik	
b.	Mini Bus Toyota Kijang BE 2936 AZ	1	Baik		
c.	Mini Bus Daihatsu Pick Up BE 9823 AZ	1	Baik		
d.	Mini Bus Maven DX GLX BE 2517 AY	1	Baik		
e.	Toyota Innova E BE 30	1	Baik		
f.	Toyota Avanza Seri V BE 2815BZ	1	Baik		
2.	Kendaraan Roda Dua				
a.	Yamaha Jupiter MX BE 3258 CZ	1	Baik		
3.	Mesin ketik manual	10	3baik	7 kurang baik	
4.	PC Unit Komputer	20	17 baik	3 kurang baik	
5.	Printer	21	19 baik	2 kurang baik	
6.	Laptop/Notebook	16	7 Baik	9 kurang baik	
7.	Scanner	1	Baik		
8.	AC	35	33 Baik	2 kurang baik	
9.	Overhead Projektor	2		2 kurang baik	
10.	Kursi Pejabat Ess. III	5	Baik		
11.	Kursi putar	150	90 Baik	60 Kurang baik	
12.	Kursi lipat	121	60 Baik	61 Kurang baik	
13.	Sofa	2	Baik		
14.	Meja kerja pegawai non struktural	3	Baik		
15.	Meja ½ biro	22	Baik		
16.	Meja komputer	6	4 Baik	2 Kurang baik	rusak
17.	Meja rapat	22	Baik		



No.	SARANA DAN PRASARANA	JML	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
18.	Meja piket	1	Baik		
19.	Lemari besi/metal	3	Baik		
20.	Rak besi/metal	6	Baik		
21.	Rak kayu	1	Baik		
22.	Fillingbesi/metal	51	11 Baik	40 Kurang baik	
23.	Brankas	10	5 Baik	5 Kurang baik	
24.	Papan nama instansi	1	Baik		
25.	Papan pengumuman	4	2 Baik	2 Kurang baik	
26.	White board	6	5 Baik	1 Kurang baik	
27.	Peta	8	4 Baik	3 Kurang baik	
28.	Televisi	12	Baik		
29.	Sound system	5	3 Baik	2 Kurang baik	
30.	UPS	1	Baik		
31.	LCD	1	Baik		
32.	Stabilisator	2		2 kurang baik	
33.	Kamera film	2	Baik		
34.	Kamera + Attachmen	6	4 Baik	2 Kurang baik	
35.	Handycam	6		5 Kurang baik	rusak
36.	Handy Talkie	6	Baik		
37.	Faximile	4	2 Baik	2 Kurang baik	
38.	Stabilizer	1	Baik		
39.	Bel listrik	1	Baik		
40.	Tower air	1	Baik		
41.	Mesin pompa air jet pump	1	Baik		
42.	Mesin pompa air pendorong	2	Baik		
43.	Tutup mesin pompa dan pendorong air	3	Baik		
44.	Hordeng dan perelengkapannya	380m /120m	Baik		
45.	Buku Perundang-undangan	72	Baik		
46.	Dispenser	1	Baik		
47.	Spring bed	7	Baik		
48.	Absensi sidik jari	1	Baik		
49.	CCTV	8	Baik		
50.	Vacum cleanner	1	baik		
51.	Web camera	1	Baik		

II.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam lima tahun periode Renstra PD Tahun 2015 -2019 dapat digambarkan sebagai berikut



Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Prosentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Provinsi Lampung				72,00	76,00	77,00	78,00	80,00	80,00	68,21	74,36	77,50	80,60	8,00	-7,79	-2,64	-0,50	0,60
2	Prosentase Aksi Penanganan Konflik di Provinsi Lampung				100	100	100	100	100	105,26	100	100	100	100	5,26	0	0	0	0

Pada tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat 1 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang ingin diwujudkan dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode 2015-2019. Sampai saat ini dapat diuraikan capaian kinerja selama lima tahun sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) Provinsi Lampung.

Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 - 2019 adalah :

Tabel II.4.
Kegiatan Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

NO	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Road Show	1 kali	-	-	-	-
2.	Audensi	1 kali	-	-	-	-
3.	Raker Tim Pokja IDI Provinsi Lampung	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	2 kali



4.	Diskusi lintas partai	-	-	1 kali	1 kali	1 kali
----	-----------------------	---	---	--------	--------	--------

Tabel II.5

**Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Lampung Tahun 2014-2018**

NO	TAHUN	SKOR IDI PROVINSI LAMPUNG	PERINGKAT NASIONAL
1	2	3	4
1.	2014	72,62 (KATEGORI SEDANG)	19
2.	2015	65,95 (KATEGORI SEDANG)	28
3.	2016	61,00 (KATEGORI SEDANG)	32
4.	2017	72,01 (KATEGORI SEDANG)	21
5.	2018	68,67 (KATEGORI SEDANG)	29

2. Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kurun waktu 2015-2019 dalam rangka pendidikan politik masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel II.6

**Pembinaan Politik Masyarakat se Provinsi Lampung
Tahun 2015 – 2019**

NO	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sosialisasi UU Pemilu bagi Pemilih Pemula	5 kali				2 kali
2.	Raker dan Rakor Kesiapan Pemilu dan Pemilukada	3 kali	1 kali	2 kali	3 kali	3 kali
3.	Sosialisasi Pilkakda serentak			5 kali	2 kali	2 kali



Tingkat partisipasi politik masyarakat di Provinsi Lampung menjadi perhatian khusus pada pemilu tahun 2019, fakta yang ada menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi satu kecenderungan fenomena fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, hal ini terlihat dari beberapa hasil pemilu dan pilkada sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel II.7

**Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Provinsi Lampung
 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014-2019**

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pilkada Kabupaten/Kota	-	68,20	-	74,36	72,53	
2	Pilgub dan Wagub	76,14	-	-	-	70,99	
3	Pileg DPR/DPRD	72,97	-	-	-	-	80,60
4	Pilpres dan Wapres	72,97	-	-	-	-	80,60

3. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kurun waktu 2015-2019 dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut :

Tabel II. 8

**Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 Tahun 2015 – 2019**

NO	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Raker FPK Provinsi Lampung	1 kali	4 kali	3 kali	3 kali	2 kali
2.	Jambore Wawasan Kebangsaan	1 kali	-	-	-	-
3.	Dialog Kebangsaan	1 kali	4 kali	4 kali	1 kali	3 kali
4.	Harmonisasi dan Komunikasi lintas etnis dan Lintas Agama	-	1 kali	1 kali	2 kali	-
5.	Raker PPWK Provinsi Lampung	-	2 kali	2 kali	-	1 kali
6.	Bela Negara	1 kali	-	-	1 kali	3 kali



4. Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kurun waktu 2015-2019 dalam rangka penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel II.9

Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

NO	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Raker FKDM Provinsi Lampung	1 kali	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali
2.	Raker Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	4 kali	3 kali	3 kali	3 kali	1 kali
3.	Raker Tim Monitoring, Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung	4 kali	3 kali	2 kali	4 kali	2 kali
4.	Raker Forum Koordinasi dan Komunikasi antar Pemda dengan Intelkam dan Elemen Masyarakat	2 kali	2 kali	11 kali	1 kali	-

5. Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kurun waktu 2015-2019 dalam bidang ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut

Tabel II.10

Kegiatan Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

NO	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rembug Desa			2 kali	3 kali	3 kali
2.	Sosialisasi Radikalisme, Komunisme dan Terorisme			2 kali	2 kali	-



3.	Raker FKUB Provinsi Lampung	1 kali	4 kali	3 kali	3 kali	2 kali
4.	Pembinaan Pondok Pesantren	-	3 kali	-	2 kali	3 kali
5.	Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Karakter Bangsa	11 kali	2 kali	2 kali	4 kali	2 kali
6.	Raker Tim P4GN					1 kali
7.	Sosialisasi Pencegahan Narkotika					5 kali

II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

- Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

- Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi yang mengakibatkan kesulitan



untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.

- Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat Lampung yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
- Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
- Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Lampung yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan adalah:

- Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan system pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undnag politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
- Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;



- Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselerasan visi dan misi kepala daerah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu “*Rakyat Lampung Berjaya*” khususnya misi ke-1 yaitu ; ”Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai”.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, maka masalah- masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Bidang Politik Dalam Negeri :
 - 1) Tingginya dinamika perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 - 2) Belum optimalnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Provinsi Lampung;
 - 3) Minimnya wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik perempuan, kaum difabel, pemilih pemula dan kaum muda milenial di Provinsi Lampung.
- b. Bidang ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
 - 1) Menurunnya pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Provinsi Lampung;
 - 2) Masih terdapatnya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain;
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional
 - 1) Masih banyaknya potensi konflik sosial, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung;



- 2) Masih lemahnya koordinasi antar instansi/ lembaga dalam pendataan dan pamantauan Warga Negara Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung.
- d. Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan:
- 1) Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya dikalangan generasi muda di Provinsi Lampung;
 - 2) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang di Provinsi Lampung.

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel III.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan



			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di Masyarakat.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

III.2. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Mengacu pada visi pembangunan Provinsi Lampung tahun 2005 – 2025 yang telah digariskan oleh Perda Lampung Nomor 6 Tahun 2007, serta mencermati potensi dan permasalahan Provinsi Lampung, maka visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa bakti 2019 – 2024 adalah

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung menjadi “subjek utama” dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana



dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai

Visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut dimaksud sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- b. Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c. Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d. Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.



Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu **LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025**

Untuk mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2019-2024 adalah:

- Misi - 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai
- Misi - 2 : Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
- Misi - 3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel
- Misi - 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
- Misi - 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
- Misi - 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Dari Misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengambil fokus mendukung Misi pertama yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai dengan melaksanakan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan agenda RPJMD Provinsi Lampung periode 2019-2024 yaitu :

- a. Lampung Merawat Indonesia, dengan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan



- b. Lampung menuju bebas narkoba, dengan mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.

Dalam melaksanakan misi ke-satu dan agenda kerja tersebut diatas, pokok – pokok program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai berikut :

- a. Melaksanakan upaya untuk memperkokoh penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan media masa, serta lembaga dan organisasi terkait;
- b. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum
- c. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan masalah-masalah sosial lainnya
- d. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu mewujudkan Misi ke-1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu : " Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai” dengan cara mewujudkan Provinsi Lampung yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI. Untuk itu cara pengukuran yang tepat adalah melalui Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung.



III.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 yaitu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dalam negeri yang akan diwujudkan melalui peningkatan stabilitas politik dalam negeri dan penguatan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang didukung dengan partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu, indeks kinerja ormas, turunnya peristiwa konflik sosial serta peningkatan indeks demokrasi indonesia.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kab/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kab/Kota.

III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata



Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan



Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung diarahkan pada Pendidikan Politik, Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, telaah visi- misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Lampung ke depan, yaitu :

1. **Kondusivitas Wilayah** : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah
2. **Toleransi** : Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
3. **Demokrasi** : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024 yaitu meningkatnya budaya toleransi dan demokrasi masyarakat maka ditetapkan Tujuan jangka menengah yaitu meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah dengan indikator tujuan adalah prosentase menurunnya potensi konflik sosial menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah :

- a. Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan indikator sasaran prosentase menurunnya potensi konflik sosial menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung; dan
- b. Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik dengan indikator sasaran adalah prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.

Pernyataan tujuan dan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dapat dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE -					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase Penurunnya konflik sosial	15%	15%				
			Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung			80,00	85,00	87,50	90,00
		Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	72,00	72,00				
			prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih			72,25	72,50	72,75	73,00

Selain Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat sasaran yang bersifat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran tersebut adalah : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah dengan penerapan absensi elektronika dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung. Dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel IV.2
Tujuan dan Sasarana Pendukung Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung Tahun 20-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memperkuat kelembagaan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Badan Kesbangpol Daerah per-tahun	86%	88%	90%	92%	94%	96%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	60%	62%	64%	66%	68%	70%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kurun waktu 2019-2024, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan sinergi kemitraan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan Pemerintah Daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kinerja dalam pelayanan dan pengawasan Ormas;
 - b. Melaksanakan kemitraan dengan Ormas dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
 - c. Melaksanakan forum-forum komunikasi dan koordinasi Ormas dengan Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan arah kebijakan:
 - a. Melaksanakan forum-forum penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - b. Melaksanakan pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan;
 - c. Melaksanakan gerakan kampanye nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial; dan
 - d. Meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah.
3. Penguatan kebhinnekaan berbangsa dan bernegara melalui ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, dengan arah kebijakan:



- a. Meningkatkan upaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di daerah;
 - b. Meningkatkan stabilitas ketahanan ekonomi di daerah;
 - c. Meningkatkan kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan Ormas;
 - d. Melaksanakan kemitraan pemerintah dengan Ormas dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
 - e. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama di daerah.
 - f. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.
4. Peningkatan kewaspadaan nasional, dengan arah kebijakan:
- a. Melaksanakan forum-forum dialog kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;
 - b. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan kewaspadaan dini dan deteksi dini;
 - c. Mengoptimalkan koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah.
5. Peningkatan kualitas sistem politik dalam negeri, dengan arah kebijakan:
- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah;
 - b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil di daerah;
 - c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat di daerah; dan
 - d. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan situasi politik dalam negeri di daerah



Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI I : Menciptakan kehidupan yang relegius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.			
Tujuan	Sasaran	strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah	1. Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	1. Peningkatan sinergi kemitraan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan Ormas
		2. Peningkatan implementasi nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	2. Melaksanakan kemitraan pemerintah dengan Ormas dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
			3. penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
			4. Melaksanakan pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan
			5. Melaksanakan gerakan kampanye nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial
		3. Penguatan kebhinnekaan berbangsa dan bernegara melalui ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	6. Meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah
			7. Meningkatkan upaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di daerah
			8. Meningkatkan stabilitas ketahanan ekonomi di daerah
		4. Peningkatan kewaspadaan nasional	9. Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan konflik berlatar belakang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama di daerah
			10. Melaksanakan forum-forum dialog kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah
			11. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan kewaspadaan dini dan deteksi dini



	2. Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	5. Peningkatan kualitas sistem politik dalam negeri	13. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan situasi politik dalam negeri di daerah
			14. Meningkatkan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah
			15. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil di daerah; dan
			16. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat di daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud sebagai acuan penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023 dan Tahun 2024.

VI.I. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdapat 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan.

Indikator kinerja program atau outcome adalah prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dengan indikator kegiatan/ outcome adalah prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan setiap tahunnya, serta dengan Sub Kegiatan dan Indikator/output sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan program kerja di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator/output jumlah rapat penyusunan program kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan



- Kebangsaan (PPWK) dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Provinsi Lampung;
- b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator/output berupa jumlah raker FPK, PPWK dan GNRM Provinsi Lampung;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator/output berupa jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan GNRM Provinsi Lampung; dan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator/output berupa jumlah monitoring dan evaluasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Indikator kinerja program/outcome adalah prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta



Pemantapan Situasi Politik dengan indikator/outcome prosentase pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik serta Sub Kegiatan dan indikator/output sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator/ output jumlah rapat penyusunan program kerja;
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator/ output jumlah rapat kerja penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator/ output jumlah kegiatan FGd Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung, Rapat Kerja IDI dan rapat verifikasi bantuan kepada partai politik;
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan



Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator/ output jumlah kegiatan sosialisasi, Bimtek dan pembinaan kepada partai politik; dan

- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator/ output jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.

Indikator kinerja program/outcome adalah prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan masyarakat di Provinsi Lampung, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan indikator/ outcome prosentase pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat serta Sub Kegiatan dan Indikator/ output sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indikator/ output jumlah rapat kerja dan pembinaan ormas; dan
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan



indikator/ output jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Indikator kinerja program/outcome adalah prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator/ outcome prosentase pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta Sub Bidang, indikator/ output sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah dengan indikator/ output jumlah kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkotika, rapat kerja tim P4GN, pembinaan pondok pesantren dan fasilitasi FKUB; dan
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah dengan indikator/ output jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Indikator kinerja program/outcome adalah prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan



Pemanatapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator/ outcome prosentase pelaksanaan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik setiap tahunnya, serta sub kegiatan, indikator/ output sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasinKelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan indikator/ output jumlah rapat perumusan kebijakan;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasinKelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan indikator/ output jumlah sosialisasi dan pembinaan kewaspadaan dini di Daerah;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasinKelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan indikator/ output jumlah rapat koordinasi;
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasinKelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan indikator/output jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan



- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Peimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi dengan indikator/ output jumlah rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Lampung.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja program/outcome adalah prosentase Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan indikator/outcome/output sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator/outcome prosentase penyusunan laporan kinerja dan dokumen perencanaan, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan indikator/output sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator/ outputnya jumlah dokumen perencanaan;
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikator/ outputnya jumlah dokumen tepat waktu; dan
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator/ outpnya jumlah dokumen evaluasi kinerja tepat waktu.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator/ outcome prosentase layanan administrasi keuangan, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan indikator/ output sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator/ output jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan



- indikator/ output jumlah badan/ lembaga penerima hibah uang;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD dengan indikator/ output jumlah dokumen akutansi; dan
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan indikator/output jumlah dokumen keuangan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan indikator/ outcome prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan indikator/ output sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator/ output Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah; dan
 - 2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator/ output jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator/ outcome prosentase layanan administrasi kepegawaian terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator/ output jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator/ outcome prosentase layanan administrasi umum, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan indikator/ output sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator/ output jumlah unit peralatan listrik kantor yang tersedia;



- 2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator/ output jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator/output jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga;
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator/ output Jumlah layanan fasilitasi kunjungan tamu;
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator/output jumlah barang cetak dan penggandaan;
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan indikator/ output Jumlah penyediaan bahan/material; dan
 - 7) Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan indikator/ output jumlah koordinasi dan konsultasi.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator/ outcome Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan indikator/ output sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator/ output jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditingkatkan; dan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator/ output Jumlah bulan layanan jasa umum kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator/outcome Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah



terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan indikator/ output sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator/output jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara;
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator/output jumlah ruang pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator/ output jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.

VI.2. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

Terlampir.

**PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA INDIKATOR/ TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
BADAN KESBANGPOL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA					SATUAN	ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		75	75	75	75	Persen		15,588,808,824	15,611,576,426	17,734,860,630	18,820,501,232
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		90	92.5	95	97.5	persen		144,718,500	183,918,500	265,936,600	311,123,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		5	5	5	5	dokumen		101,984,000	101,184,000	121,420,000	145,704,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD		4	4	4	4	dokumen		22,182,300	22,182,300	26,618,000	31,941,600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD			4	4	4	dokumen			20,000,000	20,000,000	20,000,000

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			4	4	4	dokumen				26,618,000	31,941,600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			4	4	4	dokumen			20,000,000	20,000,000	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			12	12	12	laporan				26,618,000	31,941,600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		14	14	14	14	laporan		20,552,200	20,552,200	24,662,600	29,595,000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi keuangan	Prosentase layanan administrasi keuangan		85	90	92.5	95	persen		13,659,419,308	13,500,332,886	15,244,037,030	16,014,132,532
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		51	51	51	51	orang/ bulan		6,521,254,908	6,375,742,886	6,694,530,030	7,029,256,532
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		39	39	39	39	dokumen		7,093,574,400	7,080,000,000	8,496,000,000	8,920,800,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		12	12	12	12	dokumen		22,414,000	22,414,000	26,896,000	32,276,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		18	18	18	18	laporan		22,176,000	22,176,000	26,611,000	31,800,000
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya keselarasan laporan dan pengelola aset	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset		90	92	94	96	persen		11,684,000	23,368,000	42,060,000	50,400,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4	4	dokumen				14,020,000	16,800,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			4	4	4	laporan			11,684,000	14,020,000	16,800,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		8	8	8	8	laporan		11,684,000	11,684,000	14,020,000	16,800,000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Prosentase layanan administrasi kepegawaian		75	80	85	90	persen		19,910,000	19,910,000	71,400,000	80,400,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5	6	orang				45,000,000	54,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120	120	orang				13,200,000	13,200,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		181	181	120	120	orang/hari/kegiatan		19,910,000	19,910,000	13,200,000	13,200,000
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi umum	Prosentase layanan administrasi umum		75	80	85	90	persen		1,144,993,016	1,251,078,200	1,347,350,000	1,463,919,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12	12	12	12	paket		14,574,200	14,574,200	17,489,000	20,980,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		36	36	36	36	paket		183,228,600	345,505,000	414,606,000	497,527,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersediannya peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		12	12	12	12	paket		10,073,000	8,000,000	9,600,000	11,520,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersediannya barang cetak dan penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		12	12	12	12	paket		28,978,216	25,000,000	27,500,000	30,000,000
Penyediaan Bahan/Material	tersediannya bahan/material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan		12	12	12	12	paket		150,780,000	100,780,000	120,936,000	145,123,200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersediannya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12	12	12	12	laporan		33,450,000	33,450,000	33,450,000	35,000,000

Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		60	60	60	60	laporan		723,909,000	723,769,000	723,769,000	723,769,000
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		75	77.5	80	82.5	persen		373,410,000	399,408,840	455,390,000	546,470,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	12	12	12	laporan		150,410,000	200,408,840	216,590,000	259,910,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	12	12	12	laporan		223,000,000	199,000,000	238,800,000	286,560,000
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah		60	62.5	65	67.5	persen		234,674,000	233,560,000	308,687,000	354,055,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		7	7	7	7	unit		185,170,000	185,170,000	203,687,000	224,055,700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		8	8	8	8	unit		33,324,000	32,210,000	75,000,000	80,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		100	100	100	100	unit		16,180,000	16,180,000	30,000,000	50,000,000
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat		15	25	30	30	Persen		824,136,900	993,347,800	1,152,978,000	1,278,732,000
KEGIATAN PERUMUSAN Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan	meningkatkan pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan		15	25	30	30	Persen		824,136,900	993,347,800	1,152,978,000	1,278,732,000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		9	12	12	12	dokumen		18,603,000	26,347,500	44,647,000	53,650,000

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah		18	24	12	12	dokumen		85,606,200	96,373,000	44,647,000	53,650,000
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah				2740	2740	orang				953,884,000	1,049,272,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah		1940	2740	300	300	orang		715,381,200	867,167,500	105,600,000	116,160,000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12	15	15	15	laporan		4,546,500	3,459,800	4,200,000	6,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung		15	25	30	30	Persen		160,033,000	158,433,000	176,516,300	208,619,000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase PEMBERDAYAAN dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		15	25	30	30	Persen		160,033,000	158,433,000	176,516,300	208,619,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas		560	495	500	500	orang		138,033,000	136,833,000	150,516,300	180,619,000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas		15	15	15	15	laporan		22,000,000	21,600,000	26,000,000	28,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		15	25	30	30	Persen		370,989,000	614,593,000	674,793,000	685,000,000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		15	25	30	30	Persen		370,989,000	614,593,000	674,793,000	685,000,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1445	1370	1400	1400	orang		348,989,000	592,993,000	652,293,000	660,000,000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		15	15	15	15	laporan		22,000,000	21,600,000	22,500,000	25,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya peristiwa konflik sosial	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung		15	25	30	30	%		368,936,600	1,217,332,600	1,422,735,000	1,424,735,000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya koordinasi, Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		15	25	30	30	Persen		368,936,600	1,217,332,600	1,422,735,000	1,424,735,000

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan		8	2	4	4	dokumen		-	100,000,000	120,000,000	120,000,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan		750	950	1000	1000	orang		199,427,400	395,827,400	474,512,000	474,512,000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung		15	25	30	30	persen		515,619,000	492,819,000	545,335,000	601,352,900
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik		15	25	30	30	persen		515,619,000	492,819,000	545,335,000	601,352,900

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan		4	6	6	6	dokumen		7,823,800	7,823,800	9,400,000	11,280,000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		9	12	12	12	dokumen		12,617,000	12,617,000	15,140,000	16,000,000

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		430	450	450	450	orang		184,378,700	182,778,700	201,056,000	221,160,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		1800	1230	1250	1250	orang		304,599,500	283,399,500	311,739,000	342,912,900

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di		15	15	15	15	laporan		6,200,000	6,200,000	8,000,000	10,000,000
JUMLAH										17,828,523,324	19,088,101,826	21,707,217,930	23,018,940,132

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Lampung periode 2021 – 2024 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menentukan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, sebagaimana tabel terlampir.

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
Tahun 2019 - 2024

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	72,00	72,00	72,00					73,00
2	Menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung	-	15%	15%					15%
3.	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung				80,00	85,00	87,50	90,00	90,00
4.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih				72,25	72,50	72,75	73,00	73,00



Dari indikator kinerja utama OPD, kemudian dirumuskan kembali sesuai indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yang termuat dalam indikator program, sebagaimana tabel terlampir:

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2019-2024

NO	Program dan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan								
1	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	-	-	-	15 %	25%	30%	30%	100%
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
2	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	-	-	-	15 %	25%	30%	30%	100%
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya								
3.	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-	-	-	15 %	25%	30%	30%	100%
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial								



4.	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	-	-	-	80%	85%	87,5%	90%	90%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								
5.	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	-	-	-	72,25%	72,50%	72,72%	73%	73%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung dalam jangka waktu 2019-2024. Keberhasilan Rencana Strategis ini pun perlu didukung dengan penetapan anggaran dalam APBD Provinsi serta sumber dana lainnya yang memungkinkan dan sangat ditentukan oleh kesamaan visi dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan peran serta masyarakat sebagai mitra kerja yang semakin berkembang.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung dan merupakan pedoman penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung tahun 2023 dan 2024. Sebagai dampak dari perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020, pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ini disusun sebagai bahan rujukan dalam menetapkan kebijakan dan perumusan program dalam kurun waktu 2021-2024 ke



depan. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, sudah barang tentu Rencana Strategis ini tetap terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa dan Negara.

Bandar Lampung, Januari 2022

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG,**

Drs. M. FIRSADA, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001